

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERKOTAAN DI DESA GAPURA KECAMATAN SAMBAS KABUPATEN SAMBAS

Oleh:
IGA RIANDA
NIM. E42010002

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, 2015

E-mail : igarianda@yahoo.co.id

Abstrak

PNPM Mandiri Perkotaan merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang diluncurkan pemerintah. Program penanggulangan kemiskinan ini dilaksanakan sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan bagaimana kesesuaian antara petunjuk pelaksanaan dengan proses pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan khususnya dalam bidang pembangunan infrastruktur di Desa Gapura Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas. Jenis penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, teknik observasi, dan teknik dokumentasi. Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik "purposive" yaitu teknik untuk menentukan informan berdasarkan tujuan atau keperluan yang ditetapkan peneliti itu sendiri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan khususnya dalam pembangunan infrastruktur secara keseluruhan masih belum sesuai dengan petunjuk pelaksanaannya terutama pada tahap pelaksanaan pembangunan konstruksi dan pasca konstruksi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan penilaian dari proses pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan khususnya dalam pembangunan infrastruktur sebagai bahan pertimbangan maupun perbaikan untuk program-program penanggulangan kemiskinan kedepannya. Namun kenyataan dilapangan pelaksanaan program ini belum terlaksana secara maksimal sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ada

Kata-kata kunci: Evaluasi, Infrastruktur, Juklak, Pelaksanaan dan Proses

EVALUATION OF NATIONAL PROGRAM IMPLEMENTATION FOR COMMUNITY EMPOWERMENT (PNPM) OF AUTONOMOUS URBAN IN DESA GAPURA OF SUB DISTRICT SAMBAS, SAMBAS REGENCY

By:
IGA RIANDA
NIM. E42010002

Government Science Study Program, Cooperation between the Government of West Kalimantan
with Faculty of Social and Political Sciences University of Tanjungpura Pontianak. 2015

Abstract

PNPM Autonomous Urban is one of the poverty reduction program launched by the government. This poverty reduction programme is implemented as an attempt by the government to build community self-reliance in tackling poverty in a sustainable manner. The purpose of this study is to determine how conformity between implementation guidelines towards execution process of PNPM Autonomous Urban particularly in infrastructure development in Desa Gapura of Sub District Sambas, Sambas Regency. Type of research is descriptive qualitative approach. Techniques of data collection are using the interview, observation, and documentation techniques. Determination of the subjects in this study is using the technique of "purposive" which is a technique for determining the informant based on the purpose or specified needs of researcher it self.

The conclusion of this study implementation of PNPM Autonomous Urban specifically in infrastructure development overall is still not in accordance with its implementation guidelines particularly at the phase of construction development implementation and post-construction. This study is expected can provide an overview and assessment of the implementation process of PNPM Autonomous Urban particularly in infrastructure development as consideration and improvement for poverty reduction programme in the future. However, reality on the ground is execution of this program has not been implemented optimally in accordance with the existing implementation guidelines.

Keywords: Evaluation, Infrastructure, Guidelines, Implementation and Process.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Upaya pemerintah tidak henti-hentinya dengan semaksimal mungkin mengeluarkan berbagai macam program yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan yang ada. Namun perlu disadari bahwa program atau proyek penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah masih belum mampu mengatasi persoalan kemiskinan di tingkat masyarakat baik yang paling bawah sebagai kelompok sasaran, maupun dalam pengertian masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu disadari bahwa kemampuan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menjadi ukuran utama keberhasilan pelaksanaan kemandirian desa.

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dilaksanakan sejak tahun 1999 sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Program ini sangat strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa lembaga kepemimpinan masyarakat yang representatif, mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial masyarakat di

masa mendatang serta menyiapkan program jangka menengah dalam penanggulangan kemiskinan yang menjadi pengikat dalam kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat.

Tahun 2008 secara penuh P2KP menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan. Sebagai bagian dari PNPM Mandiri maka tujuan, prinsip dan pendekatan yang ditetapkan dalam PNPM Mandiri juga menjadi tujuan, prinsip dan pendekatan PNPM Mandiri Perkotaan, begitu juga nama lembaga kepemimpinan masyarakat berubah dari Badan Kelembagaan Masyarakat (BKM) menjadi Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM).

Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No:25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 yaitu tentang pedoman umum PNPM Mandiri. PNPM Mandiri Perkotaan merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Program ini, memberdayakan masyarakat dalam mengatasi kemiskinan berdasarkan empat penyebab kemiskinan yaitu, (1) masih banyaknya orang yang tidak berdaya, (2) lembaga pengambil keputusan tidak mampu menerapkan nilai luhur, (3) kebijakan yang

tidak berpihak bagi orang miskin, dan (4) adanya sistem sosial, politik, ekonomi, dan kondisi fisik yang tidak mendukung.

Adapun secara khusus tujuan dari PNPM Mandiri Perkotaan yaitu membantu masyarakat miskin perkotaan di kelurahan/desa peserta program mendapatkan manfaat dari peningkatan kondisi lingkungan dan tata pemerintahan yang baik. Ada tiga prinsip program yang dilakukan PNPM Mandiri Perkotaan (program tridaya). Pertama, masyarakat miskin di perkotaan membangun infrastruktur sesuai kebutuhan mereka. Mereka merencanakan sendiri kebutuhannya kemudian membangun dan mengevaluasinya. Kedua, pinjaman bergulir yang nantinya bakal digunakan untuk modal usaha masyarakat. Ketiga, pendanaan untuk kegiatan sosial yaitu mencakup bidang kesehatan dan pendidikan.

Sesuai dengan konsepsi kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan, maka tujuan yang dicapai dari pelaksanaan pembangunan infrastruktur

atau sarana dan prasarana berdasarkan buku Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan adalah:

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam melaksanakan

pengembangan lingkungan dan permukiman;

2. Meningkatkan akses/pelayanan infrastruktur dasar yang berdampak langsung pada pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi produktif warga miskin;

3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap lingkungan hunian yang sehat, tertib, aman dan lestari;

4. Mendorong terbangunnya kemitraan antara masyarakat, Dinas/Pemda dan Kelompok Peduli dalam Penanggulangan Kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur;

5. Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, khususnya selama pelaksanaan pembangunan infrastruktur;

Dari data yang didapat dari daftar alokasi PNPM Mandiri Perkotaan tahun 2012, Desa Gapura menerima BLM PNPM Mandiri Perkotaan yang cukup besar yaitu Rp 150.000.000, yaitu dengan rincian dana berasal dari APBN tahap 1 sebesar Rp 90.000.000, APBN tahap 2 sebesar Rp. 45.000.000, dan APBD sebesar Rp 15.000.000. Adapun dana BLM tersebut dialokasikan untuk kegiatan lingkungan 1 sebesar Rp. 85.500.000, kegiatan lingkungan 2 sebesar Rp42.750.000, alokasi ekonomi

Rp. 11.250.000, biaya operasional tahap 1 sebesar Rp 4.500.000, biaya operasional tahap 2 sebesar Rp 3.000.000, dan Rp 3.000.000 dialokasikan untuk ekonomi/fisik di Desa Jagur.

Berdasarkan tentang kegiatan infrastruktur PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Gapura bahwa meskipun pembangunan jalan rabat beton telah dilaksanakan 100%, namun hasil pekerjaan masih belum sesuai dengan standar pembangunan infrastruktur dimana baru satu tahun setelah pekerjaan selesai jalan rabat beton sudah mengalami kerusakan. Berdasarkan standar dari pembangunan infrastruktur seharusnya bangunan dapat bertahan selama 5 tahun setelah pengerjaannya diluar dari faktor alam seperti adanya bencana alam atau faktor alam lainnya. Dari observasi awal yang peneliti lakukan hampir sepanjang jalan rabat beton mengalami kerusakan yaitu sekitar ± 100 m dari jalan rabat beton yang dilaksanakan oleh KSM Telaga Burung. Berarti baru satu tahun setelah pekerjaan rampung dilaksanakan hampir 50% jalan rabat beton yang dilaksanakan oleh KSM Telaga Burung mengalami kerusakan/berlubang. Sedangkan untuk jalan rabat beton yang dilaksanakan oleh KSM Sempadan dan Terigas yang waktu selesai

pengerjaannya hampir bersamaan tidak mengalami permasalahan/kerusakan.

Berdasarkan dari uraian fenomena diatas dapat dipahami bahwa ada suatu permasalahan terkait dengan proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh KSM Telaga Burung. Hal ini menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian terkait dengan permasalahan ini dengan cara mengevaluasi proses pelaksanaannya. Evaluasi yang merupakan salah satu rangkaian paling akhir dari program yang telah dilaksanakan yang kemudian dilakukan penilaian terhadap pelaksanaan dari suatu kebijakan. Melalui evaluasi terdapat tahapan identifikasi terhadap hal-hal yang menjadi kendala selama proses implementasi dilakukan dan setelah itu hasil yang ada dapat dijadikan perbaikan untuk pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan selanjutnya. Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Desa Gapura Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas.

2. Rumusan Permasalahan

Adapun yang menjadi rumusan permasalahan pokok didalam penelitian ini adalah “ bagaimana kesesuaian antara proses

pelaksanaan dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan dalam bidang infrastruktur desa di Desa Gapura Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas tahun 2012-2013”?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi proses pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Desa Gapura Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas pada tahun 2012-2013 khususnya pada proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa guna mengetahui sejauh mana kesesuaian proses implementasi pelaksanaan dengan petunjuk teknis kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan.

4. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan dan memberikan sumbangan pemikiran di bidang akademik mengenai evaluasi proses pelaksanaan suatu program penanggulangan kemiskinan sehingga dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya studi ilmu kebijakan publik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk disempurnakan,

selain itu agar dapat digunakan dan diterapkan

A. KERANGKA TEORI DAN METODOLOGI

1. Kerangka teori

Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran, pemberian angka dan penilaian, kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik bahwa evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan (Dunn, 1999:608). Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi.

Evaluasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan. Jadi ini membantu pengambilan kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan.

Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah telah terselesaikan; tetapi juga menyumbang pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian dan perumusan kembali masalah (Dunn, 1999:28).

Menurut Mustofadijaja (dalam Widodo, 2007:111) evaluasi merupakan kegiatan pemberian nilai atas sesuatu “fenomena” di dalamnya terkandung pertimbangan nilai (*value judgement*) tertentu. Jawabannya sangat tergantung kepada konteksnya. Manakala konteksnya kebijakan publik, maka fenomena yang dinilai adalah berkaitan dengan tujuan, sasaran kebijakan, kelompok sasaran yang ingin dipengaruhi, berbagai instrumen kebijakan yang digunakan, respon dari lingkungan kebijakan, kinerja yang dicapai, dampak yang terjadi, dan sebagainya.

Evaluasi kebijakan publik dalam studi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik. Muhadjir (dalam Widodo, 2007:112) menyatakan bahwa evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat “membuahkan hasil”, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan/atau target kebijakan

publik yang ditentukan. Jadi, pada intinya evaluasi kebijakan publik ini bertujuan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik.

Widodo (2007:112) menyatakan bahwa Evaluasi kebijakan publik tidak hanya untuk melihat hasil (*outcomes*) atau dampak (*impacts*) akan tetapi dapat pula untuk melihat bagaimana proses pelaksanaan suatu kebijakan dilaksanakan. Dengan kata lain, evaluasi dapat pula digunakan untuk melihat apakah proses pelaksanaan suatu kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis/pelaksanaan (*guide lines*) yang telah ditentukan.

Oleh karena itu, kemudian Widodo (2007:112-113) membagi evaluasi kebijakan publik menjadi dua tipe:

- 1) Tipe Evaluasi Hasil, merupakan riset yang mendasarkan diri pada tujuan kebijakan. Ukuran keberhasilan pelaksanaan kebijakan adalah sejauh mana apa yang menjadi tujuan program yang dicapai.
- 2) Tipe Evaluasi Proses, yaitu riset evaluasi yang mendasarkan diri pada petunjuk pelaksanaan (*juklak*) dan petunjuk teknis (*juknis*). Ukuran keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan adalah kesesuaian proses implementasi suatu

kebijakan dengan garis petunjuk (*guide line*) yang telah ditetapkan.

Dari berbagai pemaparan teori di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa evaluasi kebijakan publik adalah suatu kebijakan yang bertujuan untuk melihat atau mengukur tingkat keberhasilan maupun kegagalan dari suatu kebijakan publik. Dari hasil evaluasi ini, dapat dinilai atau diukur apakah pelaksanaan suatu kebijakan publik sudah menunjukkan keberhasilan atau mungkin kegagalan dalam pelaksanaannya. Selain melihat hasil, evaluasi juga dapat pula untuk melihat bagaimana proses pelaksanaan suatu kebijakan dilaksanakan. Dengan kata lain, evaluasi dapat pula digunakan untuk melihat apakah proses pelaksanaan suatu kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis/pelaksanaan yang telah ditentukan. Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tipe evaluasi proses yaitu dengan mendasarkan pada petunjuk pelaksanaan ataupun petunjuk teknis dari program PNPM perkotaan dalam bidang infrastruktur.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu menggambarkan kesesuaian antara proses pelaksanaan dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan dalam bidang infrastruktur desa di Desa Gapura Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas. Pengumpulan data saat penelitian menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian adalah narasumber yang digunakan sebagai informan dalam melakukan wawancara atau yang akan diobservasi. Subjek penelitian dipilih secara *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah Fasilitator PNPM Mandiri Perkotaan Kecamatan Sambas, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Desa Gapura, Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) di Desa Gapura, Kepala Desa Gapura, dan Tokoh masyarakat/pemuka adat Desa Gapura.

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tahap Perencanaan Teknis

Perencanaan teknis infrastruktur program PNPM Mandiri Perkotaan secara sederhana merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menyusun rencana operasional/pelaksanaan pembangunan infrastruktur secara rinci/detil yang

dilakukan oleh masyarakat sebelum melaksanakan tahapan pembangunan fisik/konstruksi. Berdasarkan petunjuk pelaksanaannya tahap perencanaan teknis ini mencakup:

- a) Persiapan, pada tahap ini dilakukan pengorganisasian tim yang akan melaksanakan perencanaan kegiatan pembangunan infrastruktur, sekaligus pemberian bimbingan/coaching sehingga dapat melakukan kegiatan perencanaan teknis.
- b) Pelaksanaan Perencanaan Teknis Pelaksanaan Kegiatan, sekurang-kurangnya mencakup kegiatan:
 - 1) Penyediaan Lahan dan perijinan yang dibutuhkan;
 - 2) Perencanaan Teknis, mencakup kegiatan pembuatan desain/gambar-gambar perencanaan teknis dan spesifikasi teknis, Rencana Pengamanan Dampak Lingkungan dan Sosial, Lingkup Kegiatan Konstruksi, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, termasuk Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat (RKS) Pengadaan Pelaksanaan Pekerjaan untuk pihak ketiga (bila ada);
 - 3) Penyusunan Proposal pelaksanaan kegiatan;

- 4) Verifikasi Kelayakan Proposal Pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan pada tahap perencanaan teknis ini secara keseluruhan sudah sesuai dengan petunjuk pelaksanaannya.

2. Tahap Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur (Tahap Konstruksi)

Mekanisme pelaksanaan pembangunan infrastruktur PNPM Mandiri Perkotaan secara umum meliputi 2 tahap kegiatan:

- a) Persiapan Pelaksanaan Konstruksi, meliputi kegiatan:
 - 1) Pembentukan/pengembangan organisasi pengelola operasi dan pemeliharaan prasarana (termasuk rencana kerja dan aturan mainnya);
 - 2) Penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama/Surat Perjanjian Pemanfaatan Dana-Lingkungan (SPPD-L);
 - 3) Musyawarah/Rapat Persiapan Pelaksanaan Konstruksi (MP2K);
 - 4) Coaching/Penguatan Teknis dan Administrasi bagi KSM;
 - 5) Pembuatan dan Pemasangan Papan Nama Kegiatan dilokasi proyek.
- b) Pelaksanaan Konstruksi:

Pada tahap ini, dilaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur dan pengendalian terhadap

pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap ini meliputi:

- 1) Pencairan dana;
- 2) Mobilisasi tenaga kerja/bahan/alat;
- 3) Musyawarah pengadaan bahan dan alat (bila ada), khusus untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat;
- 4) Praktek kerja lapangan bagi KSM;
- 5) Pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik;
- 6) Supervisi kegiatan konstruksi;
- 7) Membuat administrasi/laporan harian, mingguan dan kemajuan pekerjaan;
- 8) Membuat dokumentasi (foto-foto) kondisi 50%, 100%;
- 9) Melakukan rapat evaluasi kemajuan mingguan lapangan;
- 10) Pelaksanaan pemeriksaan/sertifikasi dan membuat berita acara penyelesaian pekerjaan;
- 11) Pembuatan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan KSM;
- 12) Serah terima prasarana kepada pengelola pemanfaatan/operasi

dan pemeliharaan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga (bila ada).

Pada tahap pelaksanaan pembangunan konstruksi ada beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaannya, yaitu mencakup mobilisasi tenaga kerja yang tidak menggunakan tenaga yang ahli dalam bidang ini, praktek kerja lapangan bagi KSM yang tidak dilaksanakan, supervisi kegiatan konstruksi yang tidak maksimal, pemantauan dampak lingkungan kondisi 50% dan 100% oleh fasilitator yang tidak maksimal, dan rapat evaluasi kemajuan lapangan yang tidak dilaksanakan

3. Tahap Pasca Konstruksi

Pemanfaatan/Operasi dan Pemeliharaan (O&P) adalah serangkaian kegiatan terencana dan sistematis yang dilakukan secara rutin maupun berkala untuk menjaga agar prasarana yang telah dibangun tetap dapat berfungsi dan bermanfaat sesuai dengan rencana.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu ada Pengelola O&P yang bertindak selaku penggerak utama kegiatan atau Penanggungjawab O&P. Secara umum tugas-tugasnya adalah:

- 1) Menyusun rencana pemanfaatan prasarana
- 2) Menyusun rencana penerimaan dan belanja pengelola
- 3) Menyusun rencana kegiatan pemeliharaan, perbaikan, dan peningkatan pembangunan prasarana
- 4) Mengorganisasikan kegiatan pemeliharaan, perbaikan dan peningkatan pembangunan prasarana
- 5) Membuat laporan pertanggungjawaban kerja Pengelolaan Sarana dan Prasarana yang menjadi tanggungjawabnya

Selanjutnya Pengelola O&P ini menjalankan Rencana Kerja O&P yang secara umum mencakup kegiatan:

- 1) Kegiatan Pendataan Anggota
- 2) Penggalian sumber-sumber pembiayaan
- 3) Monitoring dan Inventarisasi kondisi prasarana
- 4) Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan jadwal perbaikan (termasuk pengembangan bila perlu)
- 5) Rapat-rapat berkala
- 6) Pelaporan secara berkala.

Berdasarkan keterangan dari beberapa informan, bahwa pada tahap pasca konstruksi ini proses pelaksanaannya tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ada, kegiatan pemeliharaan yang

merupakan tanggung jawab dari organisasi O&P sama sekali tidak terlaksana.

C. SIMPULAN

1. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab V tentang hasil penelitian dan pembahasan, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembangunan jalan rabat beton dari PNPM Mandiri Perkotaan ini sangat membantu masyarakat Desa Gapura. Tapi sayangnya masih belum sesuai dengan harapan karena pembangunan yang dilaksanakan tidak sepenuhnya sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ada sehingga hasil dari pembangunan jalan rabat beton tidak maksimal.
2. Berdasarkan petunjuk pelaksanaannya dalam pembangunan infrastruktur, secara umum pada tahap perencanaan teknis sudah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ada yaitu mencakup persiapan, penyediaan lahan dan perijinan yang dibutuhkan, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan jadwal pelaksanaan pekerjaan, penyusunan proposal pelaksanaan kegiatan dan

verifikasi Kelayakan Proposal Pelaksanaan Kegiatan.

3. Berdasarkan petunjuk pelaksanaan dalam pembangunan infrastruktur, pada tahap pelaksanaan pembangunan konstruksi ada beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaannya, yaitu mencakup mobilisasi tenaga kerja yang tidak menggunakan tenaga yang ahli dalam bidang ini, praktek kerja lapangan bagi KSM yang tidak dilaksanakan, supervisi kegiatan konstruksi yang tidak maksimal, pemantauan dampak lingkungan kondisi 50% dan 100% oleh fasilitator yang tidak maksimal, dan rapat evaluasi kemajuan lapangan yang tidak dilaksanakan,
4. Berdasarkan petunjuk pelaksanaan dalam pembangunan infrastruktur, pada tahap pasca konstruksi yaitu kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana yang dibuat dalam hal ini adalah jalan rabat beton belum dilaksanakan secara maksimal.

D. SARAN

Berdasarkan dari seluruh uraian hasil penelitian dan kesimpulan, dapat

dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian yang dilakukan, tim fasilitator masih kekurangan tenaga kerja yaitu pada bagian teknik dimana pada saat pelaksanaan kegiatan yang bersamaan dengan kegiatan pelatihan tim fasilitator tidak dapat turun kelapangan.
2. Seharusnya fasilitator bagian teknik dapat berkoordinasi dengan fasilitator kecamatan untuk melibatkan pihak ketiga yang ahli dalam bidang tersebut untuk turun kelapangan melaksanakan kegiatan berdasarkan dengan petunjuk pelaksanaannya.
3. Untuk tahap pasca konstruksi, yaitu kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana seharusnya KSM Telaga Burung dapat menggerakkan tim yang dibentuk untuk melaksanakan tugasnya dalam fungsi pemeliharaan dapat terlaksana secara optimal sehingga jalan rabat beton dapat terjaga.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi

Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.

- Dunn, William N. 1999. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Gulo, W. 2002. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta : Grasindo.
- Moloeng, Lexy. J. 2000. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Nugroho, D, Riant. 2003. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Remi, S.S dan P.Tjiptoherijanto. 2002. *Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia (Suatu Analisis Awal)*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Soegijoko. 1997. *Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia*. Bandung : Yayasan Soegijanto Soegijoko.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, Solichin Abdul. 1990. *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*. Malang: Rinneka Cipta
- . 2012. *Analisis Kebijakan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Wibawa, Samodra. 1994. *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*. Jakarta : Intermedia.
- Sumber-sumber yang lain:**
- Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan
- Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan.
- Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur
- <http://xpresipena.blogspot.com/2011/11/evaluasi-kebijakan-publik.html>
- [http://infosambas.wordpress.com/Sasmita, Nadia](http://infosambas.wordpress.com/Sasmita,Nadia). 2013. **Kebijakan Publik**, Melalui [http://www.academia.edu/4694245 / Pengertian Jenis-jenis dan Tingkat tingkat Kebijakan Publik](http://www.academia.edu/4694245/Pengertian-Jenis-jenis-dan-Tingkat-tingkat-Kebijakan-Publik)>. (3/1/2014).
- Airu, (2012), **Implementasi Kebijakan**, melalui [http://www.arena.kami./implementasi - kebijakan -george-edward.html](http://www.arena.kami./implementasi-kebijakan-george-edward.html)>. (3/1/2014).



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika universitas tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Iga Rianda

NIM / Periode Lulus : E42010002 / 2015

Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI

Email address / HP : igarianda@yahoo.co.id / 085151484034

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (SI), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(PNPM) MANDIRI PERKOTAAN DI DESA GAPURA KECAMATAN SAMBAS
KABUPATEN SAMBAS**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

fulltext

content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

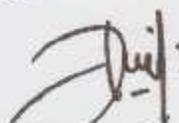
Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal 

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 13 Februari 2015


Dr. H. Wijaya Kusuma, MA
NIP. 19620214 198603 1 001


(Iga Rianda)